



MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap	4.2.1	Proporsi anak usia di bawah 5 tahun yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.	Indikator global yang akan dikembangkan.
	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.	4.7.1	Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.	Indikator global yang akan dikembangkan.

TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).



MEMJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA

TARGET 4.1

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif

Catatan:

Yang dimaksud Pemerintah Indonesia tentang Wajib Belajar 12 Tahun tanpa dipungut biaya, hanya diberlakukan untuk keluarga miskin

INDIKATOR 4.1.1*

Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.

KONSEP DAN DEFINISI

Tingkat kemahiran minimum akan diukur relatif terhadap membaca umum baru dan berhitung, saat ini dalam tahap pengembangan. Indikator ini dihitung sebagai jumlah anak-anak dan orang muda diakhir pendidikan SD atau menengah, mencapai atau melebihi tingkat kemahiran minimum, dinyatakan sebagai persentase dari semua anak-anak dan orang muda di akhir tingkat pendidikan primer atau tingkat pendidikan menengah.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah anak-anak dengan pendidikan kelas tertentu (4 SD/MI/ sederajat; 6 SD/MI/ sederajat; 9 SMP/MTs/ sederajat) yang mencapai standar kemahiran minimum dalam (i) membaca, dan (ii) matematika dibagi dengan semua anak dengan pendidikan kelas tertentu (4 SD/MI/ sederajat; 6 SD/MI/ sederajat; 9 SMP/MTs/ sederajat) yang mengikuti tes standar kemahiran minimum dalam (i) membaca, dan (ii) matematika, dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PKM = \frac{JACSM}{JAT} \times 100\%$$

Keterangan:

- PKM : Proporsi anak-anak/anak muda yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, dan (ii) matematika
- JACSM : Jumlah anak-anak dengan pendidikan kelas tertentu (4 SD/MI/ sederajat sederajat; 6 SD/MI/ sederajat; 9 SMP /MTs/ sederajat) yang mencapai standar kemahiran minimum dalam: (i) membaca, dan (ii) matematika
- JAT : Semua anak dengan pendidikan kelas tertentu (4 SD /MI/ sederajat; 6 SD/MI/ sederajat; 9 SMP/MTs/ sederajat) yang mengikuti tes standar kemahiran minimum dalam: (i) membaca, dan (ii) matematika

Catatan:

1. Data INAP (*Indonesian National Assesment Programme*) digunakan untuk mengukur anak-anak untuk membaca, matematika dan sains untuk kelas 4.
2. USBN (Ujian Sekolah Berstandart Nasional) digunakan untuk ujian Bahasa Indonesia dan Matematika kelas 6 SD/MI/ sederajat dan 9 SMP/MTs/ sederajat.

MANFAAT

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan pemantauan mutu pendidikan secara periodik dan sistematis untuk memperoleh informasi yang lebih menyeluruh dari permasalahan yang dihadapi sehingga kebijakan yang diambil dapat sinkron dengan permasalahan yang ada. Indikator ini adalah ukuran langsung dari hasil belajar yang dicapai dalam dua bidang studi pada akhir tingkat pendidikan yang relevan.

SUMBER DATA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: untuk data INAP kelas 4 SD/MI/ sederajat melalui laporan Pusat Penilaian Pendidikan, dan untuk data nilai Bahasa Indonesia dan Matematika melalui laporan nilai hasil USBN untuk kelas 6 SD/MI/ sederajat dan 9 SMP/MTs/ sederajat.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota
2. Jenis kelamin

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 4.1.1.(a)

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.

KONSEP DAN DEFINISI

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013).

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B adalah perbandingan antara jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SD/MI seluruhnya. Periode waktu akreditasi berlaku 5 tahunan, namun data akreditasi dapat dikumpulkan tahunan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SD/MI seluruhnya dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PSD/MI-AB = \frac{JSD/MI-AB}{JSD/MI} \times 100\%$$

Keterangan:

- PSD/MI-AB : Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
J SD/MI-AB : Jumlah SD/MI dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu
J SD/MI : Jumlah SD/MI pada periode yang sama

Catatan: Pada pelaporan perlu mencantumkan informasi :

1. Berapa banyak total sekolah keseluruhan pada waktu tertentu,

2. Berapa banyak sekolah yang diakreditasi pada waktu yang sama (akreditasi A dan B)
3. Berapa banyak sekolah yang belum diakreditasi pada waktu yang sama. (termasuk sekolah yang masa akreditasinya telah kadaluarsa).

Dengan demikian, dapat dipantau upaya peningkatan target cakupan sekolah yang diakreditasi Badan Akreditasi Nasional dari tahun ke tahun.

Pada saat laporan tahunan terkait akreditasi akan dijelaskan bahwa progres dari sekolah yang diakreditasi meningkat, dengan mencantumkan informasi jumlah sekolah yang sudah diakreditasi baik A,B atau C dan sekolah yang belum diakreditasi. Analisis bisa dilakukan berdasarkan sekolah negeri/swasta, lokasi, dll.

MANFAAT

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui akreditasi sekolah. Melalui indikator ini dapat diketahui banyaknya sekolah yang berakreditasi C dan yang belum terakreditasi agar dapat direncanakan pembinaan sekolah tersebut.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut: 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; dan 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

SUMBER DATA

1. Badan Akreditasi Nasional - Sekolah/Madrasah (data yang baru diakreditasi)
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan (data akumulasi tahun berjalan)

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 4.1.1.(b)

Persentase SMP/MTs
berakreditasi minimal B.

KONSEP DAN DEFINISI

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013).

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B adalah perbandingan antara jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SMP/MTs. Periode waktu akreditasi berlaku 5 tahunan, namun data akreditasi dapat dikumpulkan tahunan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SMP/MTs dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PSMP/MTs-AB = \frac{J \text{ SMP/MTs -AB}}{J \text{ SMP/MTs}} \times 100\%$$

Keterangan:

PSMP/MTs-AB : Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B
JSMP/MTs-AB : Jumlah SMP/MTs dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu
JSMP/MTs : Jumlah SMP/MTs pada periode yang sama

Catatan: Pada pelaporan perlu mencantumkan informasi :

1. Berapa banyak total sekolah keseluruhan pada waktu tertentu,
2. Berapa banyak sekolah yang diakreditasi pada waktu yang sama (akreditasi A dan B)
3. Berapa banyak sekolah yang belum diakreditasi pada waktu yang sama. (termasuk sekolah yang masa akreditasinya telah kadaluarsa).

Dengan demikian, dapat dipantau upaya peningkatan target cakupan sekolah yang diakreditasi Badan Akreditasi Nasional dari tahun ke tahun.

MANFAAT

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui akreditasi sekolah. Melalui indikator ini dapat diketahui banyaknya sekolah yang berakreditasi C dan yang belum terakreditasi agar dapat direncanakan pembinaan sekolah tersebut.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut: 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; dan 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

SUMBER DATA

1. Badan Akreditasi Nasional - Sekolah/Madrasah
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 4.1.1.(c)

Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.

KONSEP DAN DEFINISI

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013).

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B adalah perbandingan antara jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B terhadap jumlah SMA/MA. Periode waktu akreditasi berlaku 5 tahunan, namun data akreditasi dapat dikumpulkan tahunan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B dibagi dengan jumlah SMA/MA dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$P \text{ SMA/MA -AB} = \frac{J \text{ SMA/MA -AB}}{J \text{ SMA/MA}} \times 100\%$$

Keterangan:

- P SMA/MA -AB : Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
J SMA/MA -AB : Jumlah SMA/MA dengan akreditasi A dan B pada periode tertentu
J SMA/MA : Jumlah SMA/MA pada periode yang sama

Catatan: Pada pelaporan perlu mencantumkan informasi :

1. Berapa banyak total sekolah keseluruhan pada waktu tertentu,
2. Berapa banyak sekolah yang diakreditasi pada waktu yang sama (akreditasi A dan B)
3. Berapa banyak sekolah yang belum diakreditasi pada waktu yang sama. (termasuk sekolah yang masa akreditasinya telah kadaluarsa).

Dengan demikian, dapat dipantau upaya peningkatan target cakupan sekolah yang diakreditasi Badan Akreditasi Nasional dari tahun ke tahun.

MANFAAT

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui akreditasi sekolah. Melalui indikator ini dapat diketahui banyaknya sekolah yang berakreditasi C dan yang belum terakreditasi agar dapat direncanakan pembinaan sekolah tersebut.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi, berbunyi sebagai berikut: 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan

program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; dan 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

SUMBER DATA

1. Badan Akreditasi Nasional - Sekolah/Madrasah
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 4.1.1.(d)

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.

KONSEP DAN DEFINISI

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat (7-12 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A) turut diperhitungkan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah murid pada SD/MI/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$APK\ SD = \frac{JMSD}{JP7-12} \times 100\%$$

Keterangan:

APK SD : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat

JMSD : Jumlah murid pada SD/MI/ sederajat pada periode tertentu

JP7-12 : Jumlah penduduk umur 7-12 tahun pada periode yang sama.

MANFAAT

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

SUMBER DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 4.1.1.(e)

Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP/MTs/ sederajat.

KONSEP DAN DEFINISI

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ sederajat (13-15 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket B) turut diperhitungkan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah murid pada SMP/MTs/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 13-15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{JMSMP}}{\text{JP13-15}} \times 100\%$$

Keterangan:

- APK SMP : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
JM SMP : Jumlah murid pada SMP/MTs/ sederajat pada periode tertentu
JP13-15 : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama

MANFAAT

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

SUMBER DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 4.1.1.(f)

KONSEP DAN DEFINISI

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA /sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA /sederajat (16-18 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket C) turut diperhitungkan.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{APK SMA} = \frac{\text{JMSMA}}{\text{JP16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

APK SMA : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA /sederajat
JM SMA : Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/sederajat pada periode tertentu
JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama

MANFAAT

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

SUMBER DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 4.1.1.(g)

Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.

KONSEP DAN DEFINISI

Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun adalah jumlah tahun belajar penduduk umur ≥ 15 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi: a) Partisipasi sekolah; b) Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki; c) Ijazah tertinggi yang dimiliki; d) Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Rumus:

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$$

Keterangan:

MYS (*Mean Years of Schooling*) : Rata-Rata Lama Sekolah

P_{15+} : Jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Lama sekolah penduduk ke-i

- a. Tidak Pernah Sekolah : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama
- b. Masih sekolah di SD-S1 : konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
- c. Masih sekolah di S2/S3 : konversi ijazah terakhir + 1
- d. Tidak sekolah lagi dan tamat di sekolah terakhir : konversi ijazah terakhir
- e. Tidak sekolah lagi dan tidak tamat di sekolah terakhir : konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

MANFAAT

Indikator ini untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS/ *Mean Years of Schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

SUMBER DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 4.2

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

INDIKATOR 4.2.2.(a)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD).

KONSEP DAN DEFINISI

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun).

Dalam hal ini, PAUD meliputi Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu,

PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, PAUD Inklusi, Kelompok Bermain, dan Tempat Penitipan Anak (*Day Care*).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

Jumlah murid yang mengikuti PAUD dibagi dengan jumlah anak umur 3-6 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{APK PAUD} = \frac{\text{JMPAUD}}{\text{JP3-6}} \times 100\%$$

Keterangan:

APK PAUD : Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
JMPAUD : Jumlah murid pada PAUD pada periode tertentu
JP3-6 : Jumlah penduduk umur 3-6 tahun pada periode yang sama

MANFAAT

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

SUMBER DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 4.3

Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

INDIKATOR 4.3.1.(a)

Angka Partisipasi Kasar
(APK)
SMA/SMK/MA/ sederajat.

KONSEP DAN DEFINISI

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat (umur 16-18 tahun). Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket C) turut diperhitungkan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/ sederajat dibagi dengan jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$\text{APK SMA} = \frac{\text{JMSMA}}{\text{JP16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

APK SMA : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
JMSMA : Jumlah murid pada SMA/SMK/MA/ sederajat pada periode tertentu
JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama

MANFAAT

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang

bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

SUMBER DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 4.3.1.(b)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).

KONSEP DAN DEFINISI

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (umur 19-23 tahun).

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Jumlah mahasiswa pada Perguruan Tinggi (PT) dibagi dengan jumlah penduduk umur 19-23 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$APK\ PT = \frac{JMPT}{JP19-23} \times 100\%$$

Keterangan:

- APK PT : Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)
JM PT : Jumlah murid pada Perguruan Tinggi (PT) pada periode tertentu
JP19-23 : Jumlah penduduk umur 19-23 tahun pada periode yang sama

MANFAAT

Indikator ini untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

SUMBER DATA

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.
2. Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi: Data mahasiswa (Pusdatin)

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 4.4

Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

INDIKATOR 4.4.1*

Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir).

Sebuah komputer mengacu pada komputer desktop, laptop atau tablet (atau genggam serupa komputer). Ini tidak termasuk peralatan dengan beberapa kemampuan komputasi seperti Smart-TV, dan perangkat telepon sebagai fungsi utama mereka, seperti smartphone.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

1. Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
2. Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus 1:

$$\text{PR-TIK} = \frac{\text{JRAI}}{\text{JR15-24}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PR-TIK : Proporsi remaja dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- JRAI : Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
- JR15-24 : Jumlah penduduk remaja (umur 15-24 tahun) pada periode yang sama

Rumus 2:

$$\text{PD-TIK} = \frac{\text{JDAI}}{\text{JD15-59}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PD-TIK : Proporsi dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- JDAI : Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir
- JD15-59 : Jumlah penduduk dewasa (umur 15-59 tahun) pada periode yang sama

MANFAAT

Keterampilan TIK menentukan penggunaan yang efektif dari produk-produk teknologi komputer. Kurangnya keterampilan ini menjadi salah satu hambatan utama untuk orang, dan pada perempuan khususnya, untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari potensi teknologi informasi dan komunikasi. Indikator ini akan membantu membuat kaitan antara penggunaan TIK dan dampak serta membantu mengukur dan melacak tingkat kemahiran pengguna TIK.

SUMBER DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 4.5

Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

INDIKATOR 4.5.1*

Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.

KONSEP DAN DEFINISI

Rasio APM-SD (1) adalah perbandingan antara APM tingkat SD (SD, MI, Salafiah Ula, dan paket A setara SD) perempuan terhadap APM tingkat SD laki-laki.

Rasio APM-SMP (2) adalah perbandingan antara APM tingkat SMP (SMP, MTs, Salafiah wustha, dan paket B setara SMP) perempuan terhadap APM tingkat SMP laki-laki.

Rasio APM SMA (3) adalah perbandingan antara APM tingkat menengah (SMA, SMK, MA, Salafiah Ulya dan paket C setara SM) perempuan terhadap APM tingkat menengah laki-laki.

Rasio APK Perguruan Tinggi (PT) (4) perbandingan antara APK tingkat PT perempuan terhadap APK tingkat PT laki-laki.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan (1):

APM-SD: Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rasio APM-SD: APM perempuan terhadap APM laki-laki pada tingkat SD/MI/ sederajat dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus APM-SD:

$$\text{APM SD} = \frac{\text{JMSD}}{\text{JP7-12}} \times 100\%$$

Keterangan:

APM SD : Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat

JMSD : Jumlah murid tingkat SD/MI /sederajat umur 7-12 tahun pada periode tertentu

JP7-12 : Jumlah penduduk umur 7-12 tahun pada periode yang sama

Rumus R-APM SD:

$$\text{RAPM SD} = \frac{\text{APM-P SD}}{\text{APM-L SD}} \times 100\%$$

Keterangan:

RAPM SD : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat

APM-P SD : APM perempuan di tingkat SD/MI/ sederajat pada periode tertentu

APM-L SD : APM laki-laki di tingkat SD/MI/ sederajat pada periode yang sama

Cara Perhitungan (2):

APM-SMP: Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rasio APM-SMP: APM perempuan terhadap APM laki-laki pada tingkat SMP/MTs/ sederajat dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus APM-SMP:

$$\text{APM SMP} = \frac{\text{JMSMP}}{\text{JP13-15}} \times 100\%$$

Keterangan:

APM SMP : Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat

JMSMP : Jumlah murid tingkat SMP/MTs/ sederajat umur 13-15 tahun pada periode tertentu

JP13-15 : Jumlah penduduk umur 13-15 tahun pada periode yang sama

Rumus R-APM SMP:

$$\text{RAPM SMP} = \frac{\text{APM-P SMP}}{\text{APM-L SMP}} \times 100\%$$

Keterangan:

RAPM SMP : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ sederajat

APM-P SMP : APM perempuan di tingkat SMP/MTs/ sederajat pada periode tertentu

APM-L SMP : APM laki-laki di tingkat SMP/MTs/ sederajat pada periode yang sama

Cara Perhitungan (3):

APM-SMA: Jumlah murid umur 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SMA/MA/ sederajat dibagi jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rasio APM-SMA: APM perempuan terhadap APM laki-laki pada tingkat SMA/MA/ sederajat dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus APM-SMA:

$$\text{APM SMA} = \frac{\text{JMSMA}}{\text{JP16-18}} \times 100\%$$

Keterangan:

APM SMA : Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat

JM SMA : Jumlah murid tingkat SMA/MA/ sederajat umur 16-18 tahun pada periode tertentu

JP16-18 : Jumlah penduduk umur 16-18 tahun pada periode yang sama

Rumus R-APM-SMA:

$$\text{RAPM SMA} = \frac{\text{APM-P SMA}}{\text{APM-L SMA}} \times 100\%$$

Keterangan:

RAPM SMA : Rasio Angka Partisipasi Murni (APM)

perempuan/laki-laki di SMA/MA/ sederajat

APM-P SMA : APM perempuan di tingkat SMA/MA/ sederajat pada periode tertentu

APM-L SMA : APM laki-laki di tingkat SMA/MA/ sederajat pada periode yang sama

Cara Perhitungan (4):

APK-PT: Jumlah mahasiswa pada PT dibagi dengan jumlah penduduk umur 19-23 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rasio APK-PT: APK perempuan terhadap APK laki-laki pada tingkat Perguruan Tinggi (PT) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus APK-PT:

$$\text{APK PT} = \frac{\text{JMPT}}{\text{JP19-23}} \times 100\%$$

Keterangan:

PK PT : Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di PT

JMPT : Jumlah mahasiswa PT pada periode tertentu

JP19-23 : Jumlah penduduk umur 19-23 tahun pada periode yang sama

Rumus R-APK PT:

$$\text{RAPK PT} = \frac{\text{APK-P PT}}{\text{APK-L PT}} \times 100\%$$

Keterangan:

RAPMK PT : Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di PT

APK-P PT : Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan pada PT pada periode tertentu

APK-L PT : Angka Partisipasi Kasar (APK) laki-laki pada PT pada periode yang sama

MANFAAT

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana

untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APK yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki.

SUMBER DATA

1. BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
3. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 4.6

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

INDIKATOR 4.6.1.(a)

Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase angka melek aksara/huruf (AMH) penduduk umur ≥ 15 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur ≥ 15 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

Banyaknya penduduk umur ≥ 15 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$PAMH \geq 15 = \frac{JAMH \geq 15}{JP \geq 15} \times 100\%$$

Keterangan:

- PAMH ≥ 15 : Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun
- JAMH ≥ 15 : Banyaknya penduduk umur ≥ 15 tahun yang melek huruf pada periode tertentu
- JP ≥ 15 : Jumlah penduduk umur ≥ 15 tahun pada periode yang sama

MANFAAT

AMH merefleksikan *out come* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.

SUMBER DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

INDIKATOR 4.6.1.(b)

Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.

KONSEP DAN DEFINISI

AMH penduduk umur 15-24 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15-24 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap jumlah penduduk umur 15-24 tahun.

AMH penduduk umur 15-59 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk berumur 15-59 tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, dengan jumlah penduduk umur 15-59 tahun.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

(1) Banyaknya penduduk umur 15-24 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk umur 15-24 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

(2) Banyaknya penduduk umur 15-59 tahun yang melek huruf dibagi jumlah penduduk umur 15-59 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus 1:

$$\text{PAMH 15-24} = \frac{\text{JAMH 15-24}}{\text{JP15-24}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAMH 15-24 : Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun
JAMH 15-24 : Banyaknya penduduk umur 15-24 tahun yang melek huruf pada waktu tertentu
JP15-24 : Jumlah penduduk umur 15-24 tahun pada periode yang sama

Rumus 2:

$$\text{PAMH 15-59} = \frac{\text{JAMH 15-59}}{\text{JP15-59}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAMH 15-59 : Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun
JAMH 15-59 : Banyaknya penduduk umur 15-59 tahun yang melek huruf pada waktu tertentu
JP15-59 : Jumlah penduduk umur 15-59 tahun pada periode yang sama

MANFAAT

AMH merefleksikan *outcome* pendidikan dasar sejak 10 tahun terakhir sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Indikator ini kerap dilihat sebagai proksi untuk mengukur kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi.

SUMBER DATA

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi dan kabupaten/kota
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Jenis kelamin
4. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 4.a

Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

INDIKATOR 4.a.1*

Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).

KONSEP DAN DEFINISI

Proporsi sekolah berdasarkan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan menengah atas) dengan akses terhadap fasilitas atau layanan yang diberikan (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)). Yang disebut dengan air minum layak adalah air bersih, bukan air minum aman (*drinking water*).

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan :

1. Jumlah sekolah dasar (SD/MI/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah dasar dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
2. Jumlah sekolah menengah (SMP/MTs/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah (SMP) dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
3. Jumlah sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA/ sederajat) yang mempunyai fasilitas* dibagi dengan jumlah seluruh sekolah menengah atas dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus 1:

$$\text{PSDAF*} = \frac{\text{JSDAF*}}{\text{JSD}} \times 100\%$$

Keterangan:

PSDAF* : Proporsi SD/MI/ sederajat dengan akses ke fasilitas tertentu

JSDAF* : Jumlah SD/MI/ sederajat yang memiliki fasilitas tertentu

JSD : Jumlah seluruh SD/MI/ sederajat

Rumus 2:

$$\text{PSMPAF*} = \frac{\text{JSMPAF*}}{\text{JSMP}} \times 100\%$$

Keterangan:

PSMPAF* : Proporsi SMP/MTs/ sederajat dengan akses ke fasilitas tertentu

JSMPAF* : Jumlah SMP/MTs/ sederajat yang memiliki fasilitas tertentu

JSMP : Jumlah seluruh SMP/MTs/ sederajat

Rumus 3:

$$\text{PSMAAF*} = \frac{\text{JSMAAF*}}{\text{JSMA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PSMAAF* : Proporsi SMA/SMK/MA/ sederajat dengan akses ke fasilitas tertentu

JSMAAF* : Jumlah SMA/SMK/MA/ sederajat yang memiliki fasilitas tertentu

JSMA : Jumlah seluruh SMA/SMK/MA/ sederajat

Catatan untuk (*) dapat disesuaikan untuk menghitung data dari tiap tipe fasilitas di tiap jenjang.

*Tipe Fasilitas:(a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa difabel, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua/WASH).

MANFAAT

Indikator ini mengukur akses di sekolah-sekolah untuk memasukkan layanan dasar yang diperlukan untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan efektif untuk semua siswa.

SUMBER DATA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

DISAGREGASI

Wilayah administrasi: nasional dan provinsi.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 4.b

Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.

INDIKATOR 4.b.1*

Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.

KONSEP DAN DEFINISI

Total mahasiswa asing yang menerima bantuan beasiswa pendidikan dari Pemerintah Indonesia (Pemri) dan dinyatakan dalam orang. Beasiswa Unggulan ditujukan untuk mahasiswa jenjang pendidikan master (S2) dan doctoral (S3) di Indonesia dan bisa berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia pada bidang pendidikan Bahasa Indonesia, Seni dan Budaya.

METODE PERHITUNGAN

-

MANFAAT

ODA (*Official Development Assistance*) adalah ukuran diterimanya pengembangan kerjasama internasional. Dalam rangka menyediakan tempat belajar bagi negara berkembang di institusi pendidikan negara donor.

Tujuan dari indikator ini adalah:

1. Memperkuat hubungan dan kerjasama Internasional Indonesia dengan negara sahabat.
2. Mempromosikan pendidikan dan pemahaman Bahasa Indonesia, Seni dan Budaya.

3. Memajukan kerjasama di bidang pendidikan Indonesia dengan negara sahabat.

SUMBER DATA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri: Laporan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri.

DISAGREGASI

Negara.

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

TARGET 4.c

Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

INDIKATOR 4.c.1*

Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.

KONSEP DAN DEFINISI

1. Persentase guru (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik (S1/D4).
2. Persentase guru (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik.

METODE PERHITUNGAN

Cara perhitungan:

1. Jumlah guru pada tingkatan tertentu* yang berkualifikasi S1/D4 dibagi dengan jumlah seluruh guru pada tingkatan tertentu* (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
2. Jumlah guru pada tingkatan tertentu* yang bersertifikat pendidik dibagi dengan jumlah seluruh guru pada tingkatan tertentu* dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus 1:

$$PGS1S* = \frac{JGS1S*}{JGS*} \times 100\%$$

Keterangan:

- PGS1S* : Persentase Guru Kualifikasi S1/D4 pada Tingkat Pendidikan Tertentu.
- JGS1S* : Jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 pada tingkat pendidikan tertentu
- JGS* : Jumlah seluruh guru yang ada pada tingkatan pendidikan tertentu

Rumus 2:

$$\text{PGSPS*} = \frac{\text{JGSPS*}}{\text{JGS*}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PGSPS* : Persentase Guru Bersertifikat Pendidik pada Tingkat Pendidikan Tertentu
- JGSPS* : Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik pada tingkat pendidikan tertentu
- JGS* : Jumlah seluruh guru yang ada pada tingkatan pendidikan tertentu

Catatan untuk (*) dapat disesuaikan untuk menghitung data Guru Bersertifikat Pendidik Menurut tingkat pendidikan tertentu.

*Tingkat pendidikan tertentu: (i) TK, (ii) SD, (iii) SMP, (iv) SMA dan SMK, dan (v) PLB .

MANFAAT

Peningkatan Sertifikasi Profesi Pendidik diharapkan berdampak signifikan baik pada peningkatan kompetensi guru dalam proses pembelajaran maupun pada hasil belajar siswa.

Indikator ini bertujuan untuk memantau upaya peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.

SUMBER DATA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Data Pokok Pendidikan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan.

DISAGREGASI

1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi.
2. Jenis kelamin

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

Tahunan.

DRAFT